

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan yang amat penting sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak dan karakter warganegara yang demokratis dan bertanggungjawab. Untuk itu dituntut PKN dengan paradigma baru yang dapat mengembangkan kelas sebagai *democratic laboratory*, yang dapat menanamkan, mengajarkan dan mensosialisasikan kepada generasi muda/peserta didik nilai-nilai demokrasi. Untuk selanjutnya dipraktikkan dan diamalkan dalam kehidupan bersama sehingga nilai-nilai demokrasi yang mencerminkan sikap dan kepribadian demokratis akan terbentuk dimulai di lingkungan sekolah. Namun dewasa ini upaya mengembangkan sikap dan kepribadian demokratis di berbagai lingkungan di Indonesia, termasuk di lingkungan sekolah menunjukkan keprihatinan.

Hal ini dapat dilihat dari kondisi kehidupan masyarakat kita saat ini, berbagai krisis dan peristiwa yang terus berkelanjutan melanda bangsa dan negara kita yang sampai saat ini belum ada solusinya secara jelas dan tegas. Sehingga pada akhirnya menyebabkan orang frustrasi dan cenderung meluapkan perasaan tanpa kendali dalam bentuk "amuk massa" seperti unjuk rasa mahasiswa yang anarkis, tawuran antar pelajar, dan sebagainya. Hal itu menunjukkan bahwa disatu pihak masa reformasi hendaknya diisi dengan pembangunan masyarakat demokratis yang merupakan syarat penting terciptanya (*civil society*). Namun

yang terjadi justru peningkatan ketidakberadaban perilaku sebagian masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal itu merupakan tantangan bagi bangsa dan negara Indonesia yang harus segera diatasi oleh seluruh lapisan masyarakat baik itu elit politik maupun rakyat.

Untuk membentuk masyarakat demokratis tentunya setiap anggota masyarakat sangat mendambakan generasi mudanya dipersiapkan untuk menjadi warganegara yang baik dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negaranya. Masyarakat demokratis tentu perlu individu yang cerdas dan bertanggung jawab, hal itu sesuai dengan pendapat Tilar (2006 : 25), yaitu bahwa:

“Masyarakat demokratis dapat dibangun melalui hasil pendidikan dari manusia Indonesia cerdas. Proses belajar-mengajar di sekolah-sekolah bukan semata-mata untuk pendidikan intelektual, melainkan pula mengembangkan sikap demokratis, membentuk anggota masyarakat yang bertanggung jawab, dapat memanfaatkan kemampuan akalnya di dalam mempertimbangkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain”.

Sejalan dengan pendapat tersebut maka salah satu tempat yang strategis untuk menanamkan sikap demokratis adalah di lingkungan sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk membentuk generasi muda yang beriman, bertaqwa berilmu, bermoral dan memiliki sikap demokratis. Berkaitan dengan hal itu, Beyer (1988:98) mengungkapkan bahwa :

Creating and modeling a true democratic environment in the classroom can, I believe, lead to changes in society. But students must be taught to be reflective and to think globally, critically, and compassionately. If students are not challenge to participate in the gaining of knowledge and the real possibilities for learning in school, they will very likely become citizens who neglect social responsibility.

Kutipan di atas mengandung makna penting terutama bagi lingkungan sekolah sebagai lembaga pendidikan, jika lingkungan sekolah, kelas sebagai

lingkup kecil dapat menanamkan lingkungan yang demokratis, maka akan membawa perubahan yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat, terutama siswa akan mampu berfikir reflektif, global dan kritis. Jika siswa tidak tertantang untuk berpartisipasi dalam pembelajaran di sekolah/kelas, maka mungkin akan menjadi bangsa yang mengabaikan tanggung jawab sosialnya. Lebih lanjut menurut Henry P. Broughton yang dikutip dalam Zamroni, (2001 : 46), menyatakan :

“Untuk melakukan pendidikan demokrasi diperlukan dua prasyarat, yaitu: 1) Kultur sekolah yang demokratis, yang mengilhami nilai-nilai cita-cita, prinsip-prinsip demokrasi. Sekolah merupakan laboratorium masyarakat demokratis atau sebuah mini society dan, 2) Kurikulum sekolah yang demokratis, terutama ilmu-ilmu sosial yang memadai untuk mengembangkan demokrasi”.

Pernyataan tersebut sesuai pertimbangan bahwa demokrasi sebagai wacana dan praksis serta tuntutan reformasi yang tengah berlangsung, serta perlunya mewujudkan demokratisasi belajar di lingkungan persekolahan, terutama dengan pemberlakuan kurikulum baru KBK 2004 dan KTSP 2006 yang menggunakan paradigma konstruktivistik dan semangat demokratisasi pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya suatu pendidikan yang mampu mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang mengembangkan kecerdasan spiritual, rasional, emosional, dan sosial serta warga negara baik sebagai aktor sosial maupun sebagai pemimpin/khalifah.

Dalam tatanan instrumentasi kurikuler, secara historis dalam kurikulum sekolah terdapat mata pelajaran yang secara khusus mengemban misi pendidikan demokrasi, yakni mata pelajaran Civics (Kurikulum 1957/1962); Pendidikan Kemasyarakatan yang merupakan Integrasi Sejarah, Ilmu Bumi, dan

Kewarganegaraan (Kurikulum 1964); Pendidikan Kewargaan Negara, yang merupakan perpaduan Ilmu Bumi, Sejarah Indonesia, dan Civics (Kurikulum 1968/1969); Pendidikan Kewargaan Negara, dan Civics & Hukum (1973); Pendidikan Moral Pancasila atau PMP (Kurikulum 1975 dan 1984); dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn (Kurikulum 1994). Namun dalam kenyataannya sekarang sebagaimana tampak dalam fenomena sosial-kultural dan sosial-politik saat ini, terkesan tidak mengembirakan. Hal tersebut sesuai dengan berbagai penelitian seperti dihimpun oleh Djahiri, dkk (1998 : 9) menunjukkan bahwa:

“Praksis pendidikan demokrasi, dalam hal ini melalui PMP/PPKn/Penataran P-4 cenderung menitikberatkan pada penguasaan aspek pengetahuan dan mengabaikan pengembangan sikap dan keterampilan kewarganegaraan, dengan menggunakan pendekatan ekspositori yang cenderung indoktrinatif”.

Untuk itu dituntut adanya pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma baru yang dapat mengembangkan kelas sebagai laboratorium demokrasi. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Winataputra dan Budimansyah (2007: 226) bahwa :

Kelas PKN hendaknya menjadi *democratic laboratory*, lingkungan sekolah/kampus sebagai *micro cosmos of democracy*, dan masyarakat luas sebagai *open global classroom* yang memungkinkan siswa dapat belajar demokrasi dalam situasi berdemokrasi, dan untuk tujuan melatih diri sebagai warganegara yang demokratis atau *learning democracy, in democracy, and for democracy*.

Seluruh rakyat hendaknya menyadari bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting untuk mempertahankan kelangsungan demokrasi konstitusional. Sebagaimana yang selama ini dipahami bahwa ethos demokrasi sesungguhnya tidaklah diwariskan, tetapi dipelajari dan dialami. Oleh karena itu, Pendidikan

Kewarganegaraan seharusnya menjadi perhatian utama. Tidak ada tugas yang lebih penting dari pengembangan warganegara yang bertanggung jawab, efektif dan terdidik. Demokrasi dipelihara oleh warganegara yang mempunyai pengetahuan, kemampuan dan karakter yang dibutuhkan. Tanpa adanya komitmen yang benar dari warganegara terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi, maka masyarakat yang terbuka dan bebas, tak mungkin terwujud. Oleh karena itu, tugas bagi para pendidik, pembuat kebijakan, dan anggota civil society lainnya, adalah mengkampanyekan pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat dan semua instansi dan jajaran pemerintahan.

Selanjutnya sesuai dengan pernyataan yang dikutip dalam (CICED,1999), bahwa hendaknya kelas pendidikan kewarganegaraan seyogyanya dilihat dan diperlakukan, dan dikembangkan sebagai :

"...laboratory for democracy where the spirit of citizenship and humanity emanating from the ideals and values of democracy are put into the actual practice by learners and teachers as well. In such a classroom learners and teachers should collaboratively develop and share democratic climate where decision making process is acquired and learned".

Profil konseptual kelas pendidikan kewarganegaraan yang digagaskan di atas, harus dikembangkan untuk menggantikan kelas pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi saat ini yang bersifat lebih dominatif dan indoktrinatif. Dengan demikian para guru dan siswa dapat melakukan refleksi betapa bermanfaatnya nilai dan prinsip demokrasi diterapkan dalam kehidupan di sekolah yang diintegrasikan dengan kehidupan di dalam masyarakatnya. Di situlah kelas pendidikan demokrasi benar-benar dikembangkan sebagai laboratorium demokrasi yang tidak dibatasi oleh dinding ruangan kelas. Begitu

pula pendapat yang disampaikan oleh Malik Fajar (2004: 6-8) bahwa:

“PKn sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak dan karakter warganegara yang demokratis dan bertanggungjawab, PKn memiliki peranan yang amat penting. Mengingat banyak permasalahan mengenai pelaksanaan PKn sampai saat ini, maka arah baru PKn perlu segera dikembangkan dan dituangkan dalam bentuk standar nasional, standar materi serta model-model pembelajaran yang efektif dalam mencapai tujuannya”. Adapun salah satu hal yang perlu diperhatikan sebagai arah baru yaitu: Kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi. Melalui PKn, pemahaman, sikap, dan perilaku demokratis dikembangkan bukan semata-mata melalui “mengajar demokrasi” (teaching democracy), tetapi melalui model pembelajaran yang secara langsung menerapkan cara hidup berdemokrasi (doing democracy). Penilaian bukan semata-mata dimaksudkan sebagai alat kendali mutu tetapi juga sebagai alat untuk memberikan bantuan belajar bagi siswa/mahasiswa sehingga dapat lebih berhasil di masa depan. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh termasuk portofolio siswa dan evaluasi diri yang lebih berbasis kelas.

Pernyataan di atas mengandung makna bahwa pembelajaran PKn selayaknya dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektivitas dalam berpartisipasi. Sehingga Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan demokrasi dapat mengembangkan cita-cita, nilai, prinsip, dan pola perilaku demokrasi dalam diri individu warganegara, dalam tatanan iklim yang demokratis.

Namun yang menjadi masalah utama dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah penggunaan metode atau model pembelajaran dalam menyampaikan materi pelajaran secara tepat, yang memenuhi muatan tatanan nilai, agar dapat diinternalisasikan pada diri siswa serta mengimplementasikan hakekat pendidikan nilai dalam kehidupan sehari-hari-belum memenuhi harapan seperti yang diinginkan. Hal ini berkaitan dengan kritik masyarakat terhadap materi pelajaran PKn yang tidak bermuatan nilai-nilai praktis tetapi hanya bersifat

politis atau alat indoktrinasi untuk kepentingan kekuasaan pemerintah. Metode pembelajaran dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) terkesan sangat kaku, kurang fleksibel, kurang demokratis, dan guru cenderung lebih *dominan one way method*. Guru PKn mengajar lebih banyak mengejar target yang berorientasi pada nilai ujian akhir, di samping masih menggunakan model konvensional yang monoton, aktivitas guru lebih dominan daripada siswa, akibatnya guru seringkali mengabaikan proses pembinaan tatanan nilai, sikap, dan tindakan; sehingga mata pelajaran PKn tidak dianggap sebagai mata pelajaran pembinaan warga negara yang menekankan pada kesadaran akan hak dan kewajiban tetapi lebih cenderung menjadi mata pelajaran yang jenuh dan membosankan. Oleh karena itu guru PKN dituntut untuk lebih professional dalam penyelenggaraan pembelajaran yang inovatif, dari mulai persiapan dan perencanaan pembelajaran, bahan ajar, media pembelajaran, pendekatan dan model pembelajaran sampai pada tahap evaluasi, yang semuanya tentunya mengarah pada situasi dan kondisi pembelajaran yang demokratis, sehingga dapat membentuk budaya demokrasi di lingkungan sekolah.

Budaya demokrasi membutuhkan orang-orang atau masyarakat demokratis yaitu masyarakat yang memiliki dan menjalankan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupannya dalam arti memiliki sikap dan perilaku demokratis. sikap dan perilaku demokratis itu tidak tumbuh dengan sendirinya juga tidak dapat begitu saja diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya. Namun sikap dan perilaku demokratis harus ditanamkan, diajarkan dan disosialisasikan kepada generasi muda, salah satunya melalui sekolah sebagai tempat belajar berdemokrasi. Untuk selanjutnya dipraktikan dan diamalkan dalam kehidupan bersama sehingga

kepribadian demokrasi yang tercermin dalam sikap dan perilaku demokratis akan terbentuk di lingkungan sekolah.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai peran PKN dalam meningkatkan sikap demokratis dikalangan siswa, yang dilakukan di SMAN 2 Garut. Penelitian yang akan dilakukan dilatarbelakangi oleh proses pembelajaran PKN di SMAN 2 Garut yang cenderung banyak dilaksanakan melalui model pembelajaran konvensional dengan menggunakan metode ceramah dimana guru mendominasi pada saat proses PBM PKN. Selanjutnya peneliti uraikan data hasil penilaian instrumen pra penelitian mengenai pandangan siswa terhadap pembelajaran PKN di SMAN 2 Garut sebagai berikut :

Tabel 1.1

INSTRUMEN PRA PENELITIAN
PANDANGAN TENTANG PEMBELAJARAN PKN
DI SMAN 2 GARUT

Jumlah Responden 40 orang siswa terdiri dari 20 orang siswa kelas XI dan 20 Orang siswa kelas X, responden diambil secara acak dari setiap kelas

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban			
		Selalu	Sering	Jarang	Tidak Pernah
1.	Materi PKN dikaitkan dengan pengalaman hidup siswa.	2,5%	5%	77,5%	15%
2.	Materi pembelajaran PKN bersifat aktual, sesuai dengan kehidupan sehari-hari.	0%	37,5%	50%	12,5%
3.	Guru selalu memberikan contoh yang sesuai dengan persoalan yang terdapat di masyarakat	22,5%	22,5%	45%	10%
4.	Guru PKN menerapkan model pembelajaran yang bervariasi.	2,5%	7,5%	70%	20%

5.	Guru PKN menerapkan model pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.	10%	20%	47,5%	22,5%
6.	Guru PKN menerapkan model pembelajaran yang dapat menempatkan siswa sebagai subyek/pusat dalam pembelajaran.	2,5%	12,5%	25%	60%
7.	Guru PKN menerapkan metode ceramah	62,5%	25%	12,5%	0%
8.	Guru mendominasi pada saat proses PBM PKN	75%	12,5%	7,5%	5%
9.	Pembelajaran PKN cenderung membosankan /menjenuhkan	37,5%	42,5%	17,5%	20%
10.	Siswa tidak aktif saat proses pembelajaran PKN	25%	55%	10%	10%

Hasil penilaian instrumen pra penelitian mengenai pandangan siswa terhadap pembelajaran PKN di SMAN 2 Garut secara lengkap terlampir.

Dari data di atas diketahui bahwa pembelajaran PKN di SMAN 2 Garut masih didominasi oleh guru yang ditunjukkan oleh data hasil sejumlah 75 % yang memilih PBM PKN selalu di dominasi oleh guru, begitu pula guru PKN diketahui tidak menggunakan model pembelajaran yang bervariasi yang ditunjukkan oleh data sejumlah 70% menyatakan jarang.

Dengan demikian untuk penelitian selanjutnya dilakukan melalui penerapan model pembelajaran yang secara langsung menerapkan cara hidup berdemokrasi (*doing democracy*) dengan membudayakan suasana belajar demokratis yang lebih menekankan pada aktivitas siswa yang tinggi dalam belajar. Guru dan siswa berupaya untuk secara aktif mencari masalah-masalah yang aktual di lingkungan sekolah, masyarakat bangsa dan negara yang selanjutnya dikemas dalam model pembelajaran aktif dan variatif. Sehingga pembelajaran PKN diharapkan akan menambah kegairahan, semangat, motivasi, dan minat siswa untuk mengikuti pelajaran dan dapat meningkatkan sikap

demokratis pada siswa sebagai perwujudan budaya demokrasi di lingkungan sekolah. Oleh karena itu penulis menyusun penelitian ini dengan judul: **Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Demokratis Berbasis Kontekstual Terhadap Peningkatan Sikap Demokratis** (Studi Quasi Experiment Pada Kelas PKN Sebagai Laboratorium Demokrasi Di Kelas X SMAN 2 Garut)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauhmana pengaruh efektifitas kelas PKN sebagai laboratorium demokrasi melalui penerapan model pembelajaran demokratis dengan menggunakan materi berbasis kontekstual, jika dibandingkan dengan pembelajaran PKN dengan menggunakan model pembelajaran konvensional dan tidak mengembangkan materi PKN berbasis kontekstual terhadap upaya peningkatan sikap demokratis pada siswa SMA. Agar masalah tersebut dapat diteliti secara akurat maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan peningkatan sikap demokratis siswa yang mendapat penerapan model pembelajaran demokratis serta pengembangan materi pembelajaran berbasis kontekstual dengan siswa yang mendapat penerapan model pembelajaran konvensional pada pembelajaran PKN?
2. Apakah terdapat pengaruh yang berarti antara penerapan model pembelajaran demokratis dengan peningkatan sikap demokratis siswa?

3. Apakah terdapat pengaruh yang berarti antara pengembangan materi pembelajaran PKN berbasis kontekstual dengan peningkatan sikap demokratis siswa?
4. Bagaimana respon guru dan siswa terhadap penerapan model pembelajaran demokratis dengan mengembangkan materi pembelajaran berbasis kontekstual dalam pembelajaran PKN?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan pengaruh dan keefektifan kelas PKN sebagai laboratorium demokrasi melalui penerapan model pembelajaran demokratis dengan mengembangkan materi PKN berbasis kontekstual dengan pembelajaran PKN melalui penerapan model pembelajaran konvensional tanpa pengembangan materi pelajaran PKN berbasis kontekstual dalam upaya meningkatkan sikap demokratis siswa SMA. Adapun secara khusus tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan peningkatan sikap demokratis siswa yang mendapat penerapan model pembelajaran demokratis serta pengembangan materi pembelajaran PKN berbasis kontekstual dengan yang mendapat penerapan model pembelajaran konvensional pada pembelajaran PKN.
2. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara penerapan model pembelajaran demokratis dengan peningkatan sikap demokratis siswa

3. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara pengembangan materi pembelajaran PKN berbasis kontekstual dengan peningkatan sikap demokratis siswa
4. Untuk mengetahui respon guru dan siswa terhadap penerapan model pembelajaran demokratis dengan mengembangkan materi pembelajaran PKN berbasis kontekstual dalam pembelajaran PKN.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis atau keilmuan maupun praktis atau empiris. Adapun manfaat-manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran khususnya dalam mengembangkan salah satu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yaitu Inovasi Pembelajaran PKN.

b. Praktis

1. Diketuinya perbedaan peningkatan sikap demokratis siswa yang mendapat model pembelajaran demokratis serta pengembangan materi pembelajaran berbasis kontekstual dengan siswa yang mendapat penerapan model pembelajaran konvensional pada pembelajaran PKN.
2. Diketuinya pengaruh yang signifikan antara penerapan model pembelajaran demokratis dengan peningkatan sikap demokratis siswa.

3. Diketuainya pengaruh yang signifikan antara pengembangan materi pembelajaran PKN berbasis kontekstual dengan peningkatan sikap demokratis siswa.
4. Diketuainya respon guru dan siswa terhadap penerapan model pembelajaran demokratis dengan mengembangkan materi pembelajaran PKN berbasis kontekstual dalam pembelajaran PKN.

E. Asumsi dan Hipotesis

Dalam upaya membangun budaya demokrasi membutuhkan orang-orang atau masyarakat demokratis yaitu masyarakat yang memiliki dan menjalankan nilai-nilai demokrasi yang secara aktual diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupannya sehari-hari. sikap demokratis itu tidak tumbuh dengan sendirinya juga tidak dapat begitu saja diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya. Namun nilai-nilai demokrasi harus ditanamkan, diajarkan dan disosialisasikan kepada generasi muda, salah satunya melalui sekolah sebagai tempat belajar berdemokrasi. Di dalam penelitian ini, sebagai titik tolak dalam berfikir, penulis berpedoman pada **asumsi** sebagai berikut :

- a. PKn sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak dan karakter warganegara yang demokratis dan bertanggungjawab, PKn memiliki peranan yang amat penting. Mengingat banyak permasalahan mengenai pelaksanaan PKn sampai saat ini, maka arah baru PKn perlu segera dikembangkan dan dituangkan dalam bentuk standar nasional, standar materi serta model-model pembelajaran yang efektif dalam mencapai tujuannya”. Adapun salah satu hal

yang perlu diperhatikan sebagai arah baru yaitu: Kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi. Melalui PKn, pemahaman, sikap, dan perilaku demokratis dikembangkan bukan semata-mata melalui "mengajar demokrasi" (*teaching democracy*), tetapi melalui model pembelajaran yang secara langsung menerapkan cara hidup berdemokrasi (*doing democracy*). Penilaian bukan semata-mata dimaksudkan sebagai alat kendali mutu tetapi juga sebagai alat untuk memberikan bantuan belajar bagi siswa sehingga dapat lebih berhasil di masa depan. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh termasuk portofolio siswa dan evaluasi diri yang lebih berbasis kelas. Malik Fadjar (2004: 6-8)

- b. Untuk melakukan pendidikan demokrasi diperlukan dua prasyarat, yaitu:
- 1) Kultur sekolah yang demokratis, yang mengilhami nilai-nilai cita-cita, prinsip-prinsip demokrasi. Sekolah merupakan laboratorium masyarakat demokratis atau sebuah mini society dan,
 - 2) Kurikulum sekolah yang demokratis, terutama ilmu-ilmu sosial yang memadai untuk mengembangkan demokrasi. Henry P. Broughton dalam Zamroni (2001 : 46)
- c. Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Somantri (2001:289)

Adapun **hipotesis penelitian** yang penulis tetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan sikap demokratis antara siswa yang mendapat penerapan model pembelajaran demokratis dengan pengembangan materi pembelajaran berbasis kontekstual dengan yang mendapat model pembelajaran konvensional tanpa pengembangan materi pembelajaran berbasis kontekstual pada pembelajaran PKN.
2. Terdapat pengaruh yang berarti antara penerapan model pembelajaran demokratis dengan peningkatan sikap demokratis siswa.
3. Terdapat pengaruh yang berarti antara pengembangan materi pembelajaran PKN berbasis kontekstual dengan peningkatan sikap demokratis siswa
4. Terdapat respon yang positif dari guru dan siswa terhadap penerapan model pembelajaran demokratis dengan mengembangkan materi pembelajaran berbasis kontekstual pada pembelajaran PKN.